

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abdul Haris Semendawai, et al. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- Adib Bahari dan Khotibul Uman. *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Darwan Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet.2. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Firman Wijaya. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul. *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005.
- Heru Susetyo dan Henry Arianto. *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lies Sulistiani. *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Buletin Kesaksian LPSK, Maret-April 2009.
- Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ronny Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000.

### II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Undang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209.

\_\_\_\_\_.*Undang-Undang Tentang Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.20 Tahun 2001, LN No.134 Tahun 2001, TLN No.4150.

\_\_\_\_\_.*Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No.4635.

## **B. Peraturan Pemerintah**

*Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat*. PP No. 99 Tahun 2012, LN No.225 Tahun 2012, TLN No.5359.

*Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PP No.71 Tahun 2000, TLN No.3995.

## **C. Keputusan Presiden**

*Keputusan Presiden Tentang Remisi*. Kepres No.174 Tahun 1999, LN No.223 Tahun 1999.

## **D. Peraturan Pemerintah**

*Peraturan Bersama Tentang perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*. PB No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, No.1 Tahun 2011, No.4 Tahun 2011.

*Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. SEMA No. 4 Tahun 2011.

## **III. WAWANCARA**

*Wawancara dengan Maharani Siti Shopia Tenaga Ahli Unit Diseminasi dan Humas LPSK*, 28 mei 2013 di LPSK.

## **IV. INTERNET**

Beda *Whistleblower* Dan *Justice Collaborators*. [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com) (diakses 18 Desember 2012).

Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Pemberantasan Birokrasi. [www.Transparansi.or.id](http://www.Transparansi.or.id) ( diakses 29 November 2012).

Sejarah Pembentukan KPK. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses 29 November 2012).

Pelapor Cek Pelawat Agus Condro Divonis 1,3 Tahun. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) (diakses 18 Desember 2012).

H Marsono, “Perangkat Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. [www.dprdukoharjokab.go.id](http://www.dprdukoharjokab.go.id) (diakses 28 Maret 2013, jam 14:10).

Sofyan Lubis, “Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana”. [www.kanturhukum-lhs.com](http://www.kanturhukum-lhs.com) (diakses 7 April 2013, jam 18.00)

LPSK Tunggu Rekomendasi Dari KPK Untuk Angie. *Hukum Online*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses 28 Maret 2013, jam 10.00).

*Justice Collaborators* Harus Penuhi Empat Syarat. [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com) (diakses 28 Maret 2013 jam 15.00).

Pakar Syarat Jadi *Justice Collaborators* Tidak Mudah. [www.ciputranews.com](http://www.ciputranews.com) (diakses 28 Maret 2013, jam 13.00).

KPK *Whistleblowers* System. [kws.kpk.go.id](http://kws.kpk.go.id) (diakses 10 April, jam 15:20).

Lobby Luqman, “Teori Penyertaan Tindak Pidana”. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) (diakses 10 April 2013, jam 10:00).